

BAB 1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil. Indonesia sering disebut pula sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan tiga perempat wilayah Indonesia terdiri dari laut atau sekitar 5,9 juta km². Oleh karena itu, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang yaitu sepanjang 95.161 km.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sudah selayaknya mengelola laut untuk berbagai kepentingan yang dapat memberikan nilai tambah. Sumber daya pesisir laut merupakan sumber daya yang sangat kuat dalam mendukung berbagai aspek kehidupan. Hal ini karena wilayah pesisir menyediakan ruang dan kemudahan bagi kehidupan ekonomi, seperti pusat kegiatan pasar, aksesibilitas, wisata, dan transportasi.

Menurut UU Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 dalam Laurentia Prisca, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir.

Perencanaan pembangunan pesisir pantai yang berkelanjutan memperhatikan pula perkembangan kawasan perkotaan dimana kawasan pesisir pantai itu berada. Pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembangunan waterfront city. Dalam pembangunan waterfront city sudah terdapat beberapa aspek perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Waterfront City merupakan konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “waterfront” dalam Bahasa Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan (Echols, 2003). Waterfront City Development juga dapat diartikan suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi ke arah perairan.

Penerapan waterfront City di Indonesia telah dimulai pada zaman penjajahan Kolonial Belanda di tahun 1620. Pembangunan konsep waterfront diterapkan oleh para penjajah yang menduduki Jakarta atau Batavia saat itu untuk membangun suatu kota tiruan Belanda yang dijadikan sebagai tempat bertemunya lalu lintas perdagangan. Penataan Sungai Ciliwung saat itu semata-mata hanya untuk kelancaran lalu lintas semata. Pada zaman Indonesia merdeka, pembangunan yang berbasis kepada paradigma kelautan sudah didengungkan sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan di Tahun 1999 yang lalu.

Pemicunya adalah kesadaran atas besarnya potensi kelautan dan perikanan perairan Indonesia yang secara laten terus menerus mengalami penjarahan oleh negara tetangga. Selain itu mulai berkurangnya pemasukan negara dari sektor hasil hutan dan tambang juga menjadi pemicu. Fakta menunjukkan, bahwa sekitar 60% dari populasi dunia berdiam di kawasan selebar 60 km dari pantai dan diperkirakan akan meningkat menjadi 75% pada tahun 2025, dan 85% pada 2050. Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sendiri menyebutkan bahwa sejumlah 166 kota di Indonesia berada ditepi air (Waterfront).

Banyaknya jumlah kota yang berada di daerah pesisir dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada kota itu, jika tidak ditata dengan baik. Permasalahan yang dapat ditimbulkan yaitu pencemaran, kesemerawutan lingkungan, dan sampah. Kekumuhan lingkungan tersebut juga dapat menimbulkan masalah kriminalitas di daerah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan kota pesisir di Indonesia harus memecahkan permasalahan tersebut. Penerapan Waterfront City di berbagai kota di Indonesia diharapkan mampu untuk memecahkan permasalahan yang timbul akibat tidak tertatanya kota-kota pesisir yang ada.

Kota Larantuka merupakan Ibu Kota Kabupaten Flores Timur, letaknya di sisi timur dari pulau Flores. Kota ini berada di sisi gunung Ile Mandiri dan langsung berhadapan dengan laut Flores. Dengan kondisi geografis yang seperti ini menyebabkan kota Larantuka memiliki kaitan yang erat dengan wilayah perairan. Namun, penataan pesisir Kota Larantuka belum dilakukan secara optimal.

Kota Larantuka memiliki potensi wisata yaitu kegiatan Tradisi Prosesi Jumad Agung yang merupakan ritual tahunan. Prosesi Jumat Agung adalah upacara inti dari perarakan sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Tradisi ini setiap tahunnya banyak menarik wisatawan. Salah kegiatan yang dilakukan yaitu perarakan membawa patung Yesus

yang disalibkan dan patung Bunda Maria dengan sampan, berlayar dari pantai Palo menuju ke pantai Kuce.

Citra Kota Larantuka bukan saja sebagai Kota Tur Religi tetapi juga potensi kawasan pesisir pantai kota larantuka. Akan tetapi ditengah gencarnya pembangunan dan pengembangan wilayah perkotaan, kawasan pusat Larantuka yang dulunya sangat dibanggakan oleh warga kota saat ini kondisinya sudah mulai rusak dan hilang identitasnya .

Sebagai kota yang memiliki keunikan kegiatan yang tidak dimiliki oleh kota lain diperlukan pengembangan kawasan kota terutama pendayagunaan segenap potensi sumber daya yang ada secara optimal melalui penataan kawasan tepi pantai terutama penyediaan fasilitas bagi para peziarah yang tidak kebagian kapal, biasanya berjalan kaki dan menggunakan kendaraan melalui jalan darat sepanjang pantai, diperlukapan penataan pesisir pantai demi mewujudkan perlindungan lingkungan serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

Kota Larantuka adalah daerah yang sebagian besar terletak di daerah Pesisir Pantai, sudah tepat apabila keberadaan Pantainya dijadikan Objek Penting dalam Pembangunan sesuai fungsi dan peruntukannya. Sebagai salah satu kota pesisir pantai, Kota Larantuka memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan menjadi percontohan kawasan waterfront hal ini disebabkan kawasan ini memiliki potensi kelautan dalam sektor pariwisata, industry pelabuhan, dan perdagangan.

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur guna mengembalikan fungsi dan fisik kawasan Larantuka. Tetapi kegiatan tersebut, belum mampu mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat secara mendalam seolah-olah semua program dan rencana yang telah disusun terabaikan.

Rasa memiliki dari masyarakat belum tumbuh secara penuh, sehingga sulit mengajak mereka untuk menjaga eksistensi kawasan pusat Kota larantuka. terjadilah degradasi fungsi, peranan, fisik, dan kualitas visual kawasan Larantuka.

Salah satu kajian waterfront dalam upaya penataan kawasan Kota terhadap proses pengembangan kawasan waterfront di kota larantuka adalah development yang merupakan contoh perencanaan yang sengaja dibentuk dengan menciptakan sebuah kawasan tepi air dengan melihat kebutuhan masyarakat di kota Larantuka itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut untuk mempertahankan perkembangannya sesuai tata ruang kota agar terwujudnya penataan kawasan Kota Larantuka dengan potensi yang berkualitas, dapat disejajarkan dengan kawasan Waterfront City lain yang ada di

Indonesia, maka Penulis terdorong untuk ,melakukan “PENATAAN KAWASAN PUSAT KOTA LARANTUKA, KABUPATEN FLORES TIMUR, KAJIAN KONSEPTUAL WATERFRONT CITY”.

1.2. PERMASALAHAN

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber daya pesisir laut merupakan sumber daya yang sangat kuat dalam mendukung berbagai aspek kehidupan.
2. Wilayah pesisir memerlukan pengelolaan dalam meningkatkan nilai social, ekonomi dan budaya masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir
3. Konsep waterfront city merupakan salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan penataan kawasan pesisir.
4. Kota Larantuka memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor pariwisata, pelabuhan, perdagangan dan permukiman na mun belum dikelola secara optimal.
5. Kurang potensialnya pemanfaatan lahan kawasan tepi air Larantuka sebagai bagian dari lahan yang bernilai tinggi dalam mengangkat Citra Kota Larantuka.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari beberapa hal di atas, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

“Bagaimana menemukan potensi dan peluang pengembangan kawasan dalam strategi penataan kawasan kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, kajian Waterfront City ?”

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1. Tujuan

Pendayagunaan segenap potensi, sumber daya yang ada pada kawasan pesisir kota larantuka dalam menciptakan citra (image) Kota Larantuka sebagai kota tepi air yang memberikan karakter visual, pendapatan, pengalaman, dan kesan pada kota secara keseluruhan.

1.3.2. Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah :

- Terwujudnya citra, *image* kota Larantuka sebagai kota tepi pantai melalui skenario pengembangan kawasan tepi air.
- Terwujudnya konsep tata ruang dan peluang pengembangan ekonomi dan investasi kawasan tepi pantai Kota Larantuka.

1.4. RUANG LINGKUP DAN BATASAN STUDI

1.4.1. Ruang Lingkup

Proses penataan kawasan waterfront bukanlah hal mudah dan memerlukan waktu yang lama untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas ruang kota di kawasan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari kualitas/mutu lingkungan di Kawasan pesisir yang masih rendah. Dalam proses perubahan itu, banyak terdapat adanya permasalahan baik itu masalah politik, masalah teknis maupun masalah sosial. Masalah sosial berkaitan dengan keadaan sosial budaya yakni menyangkut kehidupan penduduk, tradisi dan kebiasaan yang dimiliki penduduk setempat.

Oleh karena waktu yang terbatas, maka penyelesaian solusi desain hanya dibatasi pada masalah teknis yang berkaitan dengan arsitektur dan mengesampingkan masalah yang lain seperti masalah politik dan sebagainya. Penyelesaian solusi desain hanya pada penataan Waterfront.

Studi yang dilakukan akan mengacu pada tujuh (7) elemen penting dalam Waterfront yakni :

- Pesisir
- Promenade/Esplande
- Dermaga
- Jembatan
- Pulau Buatan/Bangunan Air
- Ruang Terbuka
- Aktivitas Masyarakat

Sedangkan untuk kawasan permukiman pada bagian eksternal kawasan hanya akan dibahas secara garis besar dengan penyelesaian solusi desain berupa lay out.

1.4.2. Batasan Studi

Batasan studi kawasan Waterfront yakni pada Bagian Wilayah Kota III Kota Larantuka yang diperuntukan sebagai pusat transportasi laut, perdagangan dan jasa dan juga merupakan pusat kegiatan masyarakat Kota Larantuka dinilai dalam PRK Larantuka memiliki asset yang dapat ditawarkan/dijual, antara lain berupa view panorama yang indah, kegiatan rekreasi, serta memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pada BWK III terdapat 8 (delapan) sub kawasan yang dapat dijadikan potensi perencanaan waterfront.

Gambar I- 1

Lokasi Perencanaan



(Sumber; Rencana Umum Dengan Kedalaman Rencana Tata Ruang Kota Larantuka 2007 – 2016).

Justifikasi pemilihan wilayah perancangan ditentukan berdasarkan beberapa indikator dalam teori elemen perancangan kota menurut Hamid Shirvani, antara lain :

- ✚ **Land Use (Penggunaan Lahan)**
- ✚ **Bentuk dan Massa Bangunan**
- ✚ **Sirkulasi dan Parkir**
- ✚ **Open Space (Ruang Terbuka**
- ✚ **Activity Support (Kegiatan Penunjang)**
- ✚ **Signage (petanda)**
- ✚ **Preservation (perlindungan)**

Tabel I – 1
Tabel Skoring Pemilihan Wilayah Perancangan

Keterangan : 4 : Sangat Baik 3 : Baik 2 : Buruk 1 : Sangat Buruk	No	INDIKATOR	WILAYAH PERANCANGAN							
			WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	WILAYAH 4	WILAYAH 5	WILAYAH 6	WILAYAH 7	WILAYAH 8
	1	Land Use (Penggunaan Lahan)	4	1	4	4	3	3	4	1
	2	Bentuk dan Massa Bangunan	3	2	3	2	2	2	4	2
	3	Sirkulasi dan Parkir	1	2	2	1	1	2	3	2
	4	Open Space (Ruang Terbuka)	4	3	3	1	1	1	3	2
	5	Activity Support (Kegiatan Penunjang)	1	3	2	3	2	2	3	3
	6	Signage (Petanda)	2	2	2	1	1	1	3	3
	7	Preservation (perlindungan)	4	2	2	1	2	2	4	2
	Total		19	15	18	13	12	13	24	15

(sumber : *olahan pribadi*)

Berdasarkan tabel skoring di atas maka penentuan wilayah perencanaan waterfront adalah pada wilayah 4, 5, dan 6 karena memiliki nilai skoring terendah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran ,ruang lingkup, metodologi penelitian, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikir

Meliputi pemahaman judul serta teori dan konsep yang berkaitan dengan waterfront city dan citra kota

Bab III Tinjauan Lokasi Perencanaan

Meliputi tinjauan umum wilayah perencanaan, tinjauan khusus lokasi perencanaan, serta potensi dan peluang.

Bab IV Analisis Perencanaan dan Perancangan

Meliputi data, teknik analisis data, kerangka berpikir dan keluaran yang akan di hasilkan.

Bab V Kesimpulan dan saran

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Waterfront di kawasan pesisir kota Larantuka.